

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SHARING KNOWLEDGE

**HASIL PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**

NAMA : DEWI WORO LESTARI, S.H.,M.H.
NIP : 197211301992032002
JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Umum

Manajemen risiko merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola organisasi sektor publik yang baik. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan, dinamika perubahan regulasi, serta tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik, organisasi sektor publik perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko secara sistematis dan terstruktur. Pelatihan Manajemen Risiko bagi organisasi sektor publik diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai prinsip, proses, serta implementasi manajemen risiko sesuai dengan kerangka regulasi dan pedoman nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Manajemen Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan pelaksanaan pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SPIP terdiri dari lima unsur yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern diharapkan dapat berjalan secara integral dalam setiap kegiatan instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut agar pencapaian tujuan organisasi berjalan dengan efektif diperlukan penilaian risiko dengan mengidentifikasi/menganalisis risiko yang mungkin muncul baik dari faktoreksternal maupun internal dan juga menilai faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko menggunakan mekanisme yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah melalui berbagai lembaga telah memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, maupun manajerial mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelayanan publik yang berkualitas, oleh karena hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan Sosialisasi (Sharing Knowledge) tentang Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah menjadi wadah dalam menyampaikan informasi, pengalaman, keterampilan, atau wawasan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan lain dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama, mempercepat pembelajaran, dan mendorong perbaikan kinerja.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kompetensi dan kapasitas pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam Mengidentifikasi Risiko guna memitigasi risiko yang mungkin muncul sekaligus referensi dalam penguatan budaya sadar risiko di lingkungan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup melaksanakan kegiatan Sosialisasi (*Sharing Knowledge*) Manajemen Risiko Sektor Publik disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum bersamaan dengan pelaksanaan penguatan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 3 Juni 2025 di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Sosialisasi (*Sharing Knowledge*) Manajemen Risiko Sektor Publik disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tentang Manajemen Risiko Sektor Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Badiklat) Jawa Tengah pada 14 s.d. 20 Mei 2025 secara pembelajaran jarak jauh. Kegiatan sosialisasi (*Sharing Knowledge*) dimaksud dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembekalan terkait tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun kegiatan dimaksud dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Juni 2025

Tempat : Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam *sharing knowledge* tentang Manajemen Risiko Sektor Publik ini meliputi :

1. Bersamaan dengan kegiatan pembekalan pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kegiatan *sharing knowledge* tentang Manajemen Risiko Sektor Publik diawali dengan penejelasan umum terkait penekanan pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan responsif terhadap perubahan;
2. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan materi terkait Manajemen Risiko Sektor Publik, Adapun materi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum pada kegiatan *sharing knowledge* adalah sebagai berikut :
 - a. Penjelasan terkait Konsep dasar dan prinsip manajemen risiko di sektor publik;
 - b. Penetapan konteks dan identifikasi risiko sekaligus dengan metodologinya;
 - c. Penjelasan umum terkait matriks *Risk Register*;
 - d. Strategi mitigasi dan pengendalian risiko dalam konteks program/kegiatan organisasi.

3. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, baik terkait penerapan manajemen risiko di unit Bidang, berbagi pengalaman, serta membahas solusi atas hambatan yang ada selama ini;
4. Sebagai akhir dari sesi Sosialisasi (*sharing knowledge*), Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain :
 - a. Menekankan pentingnya penerapan Manajemen Risiko pada suatu organisasi guna menciptakan kinerja yang akuntabel dan transparan;
 - b. bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya manusia yang mampu menerapkan system secara komprehensif dan bertanggung jawab;
 - c. Pentingnya peran pimpinan dan pejabat manajerial dalam upaya membangun budaya sadar risiko dan memastikan penerapan manajemen risiko menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

C. Hasil yang Dicapai

1. Peningkatan Identifikasi Risiko pada Unit Kerja

Peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja, dan siklus manajemen risiko sesuai dengan standar yang berlaku di sektor publik.
2. Pemahaman Konsep Dasar Manajemen Risiko

Melalui diskusi dan studi kasus, peserta mampu mengidentifikasi risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan di unit kerja masing-masing, serta mampu mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak.
3. Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Budaya Sadar Risiko

Sharing knowledge turut mendorong terbentuknya kesamaan pemahaman akan pentingnya membangun budaya sadar risiko di lingkungan kerja, sebagai bagian dari penguatan pengendalian intern dan peningkatan kinerja organisasi.
4. Terbentuknya Komitmen Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Kerja

Peserta menyatakan komitmennya untuk menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan dan menjadikannya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan perencanaan program/kegiatan di unit masing-masing.
5. Peningkatan Kapasitas dalam Menyusun Profil Risiko

Peserta mendapatkan keterampilan dasar dalam menyusun profil risiko, termasuk penentuan risk owner, perumusan langkah mitigasi, serta penyusunan rencana tindak lanjut pengendalian risiko.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kegiatan Sharing Knowledge Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi para peserta dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis dalam pengelolaan risiko organisasi. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain :

 - a. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, prinsip, dan proses manajemen risiko sesuai dengan kerangka regulasi sektor publik;

- b. Menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi yang baik (good governance);
- c. Membangun komitmen awal untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di instansi.

2. Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain :

a. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

Disarankan adanya pelatihan lanjutan atau pendampingan teknis secara berkala agar pemahaman dan kemampuan manajemen risiko terus berkembang sesuai dinamika organisasi.

b. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Perlu disusun mekanisme monitoring dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

c. Penguatan Komitmen Pimpinan

Dukungan dan komitmen pimpinan sangat penting dalam membangun budaya sadar risiko dan memastikan penerapan manajemen risiko menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

E. Penutup

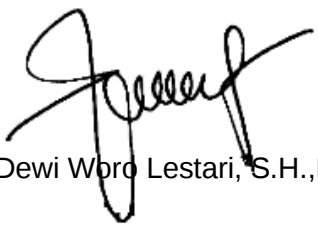
Demikian laporan kegiatan Sharing Knowledge Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

Banjarmasin, 4 Juni 2025

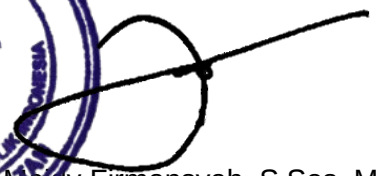
Mengetahui,

Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Pelaksana Kegiatan,


Dewi Woro Lestari, S.H.,M.H.




Melody Firmansyah, S.Sos.,M.H.

Lampiran

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan





